

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di era kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Lobam Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau = Implementation of industrial park development policy in the era of free trade zone in Lobam Bintan Regency Riau Archipelago Province

Didi Kurniadi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348845&lokasi=lokal>

Abstrak

<ABSTRAK

Sejak ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai bagian dari kebijakan pengembangan kawasan industri, Kawasan Industri Lobam mengalami penurunan jumlah perusahaan yang beroperasi. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan industri di era Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Lobam mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan berbagai sumber daya, kurangnya komunikasi antar organisasi pelaksana, selain itu kondisi ekonomi yang belum mendukung, keterbatasan berbagai sarana dan prasarana serta biaya operasional di Kawasan Industri Lobam yang tinggi. Penulis menyarankan agar BP Kawasan Bintan memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Kementerian perindustrian juga harus segera menetapkan batas atas harga jual dan sewa lahan kawasan Industri.

<hr>

ABSTRACT

Since Lobam Industrial Park became a part of Free Trade Zone Bintan in order to develop this Industrial park but the number of tenants that operate in Lobam Industrial Park decreasing. Focus of this research is the implementation of industrial park development in FTZ era. This is a qualitative research.

This research conclude that there are some problems in implementing the industrial park development policy in FTZ era, such as lack of financial and human resources, bad communications among implementing agencies, economic situations not supportive, lack of infrastructure, also high operational cost in Lobam Industrial Park. Writer suggests that BP Kawasan Bintan must have sustainable financial resources. Ministry of Industry has to set up ceiling-price of industrial land selling and leasing.